



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

2025

Provinsi Sumatera Barat

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025. APBN TA 2025 disusun dengan mempertimbangkan faktor perekonomian global dan dilandaskan pada bauran kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, serta memberikan ruang untuk pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya. Hal tersebut diperlukan agar peralihan pemerintahan dapat dilakukan secara lancar pada masa transisi. Kebijakan fiskal yang disusun diharapkan dapat menjawab tantangan, baik struktural maupun siklikal, yang berasal dari global dan domestik.

Pada tahun 2025, dunia diproyeksikan masih akan dihadapkan dengan berlanjutnya ketegangan geopolitik antarnegara yang menimbulkan perang, fragmentasi, proteksionisme, dan disrupsi rantai pasok sehingga menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Selain itu, suku bunga global yang bertahan tinggi, lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, dan gejolak pasar keuangan turut mempengaruhi risiko global. Indonesia mampu menjaga resiliensi perekonomian, investasi, dan ekspor, lebih baik dibandingkan global. Kita patut bersyukur dan bangga bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih tumbuh sebesar 5,1% di Triwulan ke-3 2024 (y-on-y).

Sebagai tahun pertama pemerintahan baru, tahun 2025 akan menjadi pilar penting untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sebelumnya. Belanja APBN menjadi instrumen untuk merespon tantangan struktural dan mengamankan dari berbagai guncangan (*shock absorber*), dirancang fleksibel dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan. Akselerasi transformasi ekonomi terus ditingkatkan melalui revitalisasi industri termasuk hilirisasi dan ekosistem *electric vehicles (EV) industry*, penguatan sektor jasa termasuk ekonomi kreatif dan digitalisasi, serta penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan *ease of doing business*, dan memperkuat daya saing produk ekspor dan investasi.

Selanjutnya, guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju dan keluar dari jebakan *middle income trap* diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, APBN harus didorong untuk semakin sehat agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan makro fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan program prioritas dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, APBN TA 2025 disusun sebagai jangkar untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan kebijakan *countercyclical* yang terukur dan terkendali. Indonesia perlu mengakselerasi

pertumbuhan ekonomi hingga 6 bahkan 8% agar mampu keluar dari *middle income trap* dengan cara menciptakan produktivitas untuk meningkatkan kemakmuran. Indonesia harus bisa membangun daya saing dan produktivitas di pasar dunia, serta menekan korupsi.

Pengelolaan fiskal daerah berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) beserta peraturan pelaksanaan turunannya. Sesuai tujuan pembentukannya, UU HKPD diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah. Adapun pokok arah kebijakan fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Mendorong sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif;
3. Menciptakan kegiatan ekonomi baru (*growth, wellbeing*, dan konvergensi);
4. Perbaikan kualitas belanja APBD;
5. Penguatan *local taxing power*;
6. Pengembangan pembiayaan inovatif; dan
7. Memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) guna menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Sejalan dengan pokok arah kebijakan fiskal dan dalam rangka menghadapi tantangan strategis di atas, maka kebijakan TKD TA 2025 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal dengan memperkuat penggunaan *earmarking* Dana Alokasi Umum (DAU), meningkatkan efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK), dan mengoptimalkan Dana Desa, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
2. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dimana TKD difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan pariwisata.
3. Menguatkan sinergi kebijakan fiskal dimana kebijakan TKD disinergikan dengan kebijakan fiskal pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih luas, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Memperluas cakupan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga diharapkan kebijakan TKD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, alokasi TKD mengalami kenaikan dari

tahun ke tahun dan telah mencapai 25,8% dari total APBN TA 2025. Pada TA ditetapkan sebesar Rp919,9 triliun, termasuk di dalamnya Dana Desa sebesar Rp71,0 triliun. Rincian alokasi masing-masing jenis Transfer ke Daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025.

Buku ini diterbitkan dalam rangka memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai alokasi masing-masing jenis dana TKD tersebut. Saya berharap, buku ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan APBD TA 2025. Mengingat pentingnya APBN TA 2025 sebagai pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang, maka saya berharap kepada segenap pemerintah daerah untuk segera memanfaatkan dana TKD tersebut sesuai dengan arah kebijakan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya untuk menjaga "Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan". Akhir kata, saya mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan TKD TA 2025. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 24 Oktober 2024

MENTERI KEUANGAN,



 SRI MULYANI INDRAWATI 

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2025	1
REKAPITULASI ALOKASI SE-PROVINSI SUMATERA BARAT	12
1. PROVINSI SUMATERA BARAT.....	13
2. KAB. LIMA PULUH KOTA	14
3. KAB. AGAM	15
4. KAB. KEPULAUAN MENTAWAI.....	16
5. KAB. PADANG PARIAMAN.....	17
6. KAB. PASAMAN	18
7. KAB. PESISIR SELATAN	19
8. KAB. SIJUNJUNG.....	20
9. KAB. SOLOK.....	21
10. KAB. TANAH DATAR	22
11. KOTA BUKIT TINGGI	23
12. KOTA PADANG PANJANG.....	24
13. KOTA PADANG	25
14. KOTA PAYAKUMBUH.....	26
15. KOTA SAWAHLUNTO.....	27
16. KOTA SOLOK.....	28
17. KOTA PARIAMAN	29
18. KAB. PASAMAN BARAT	30
19. KAB. DHARMASRAYA	31
20. KAB. SOLOK SELATAN	32
TIM PENYUSUN BUKU.....	33

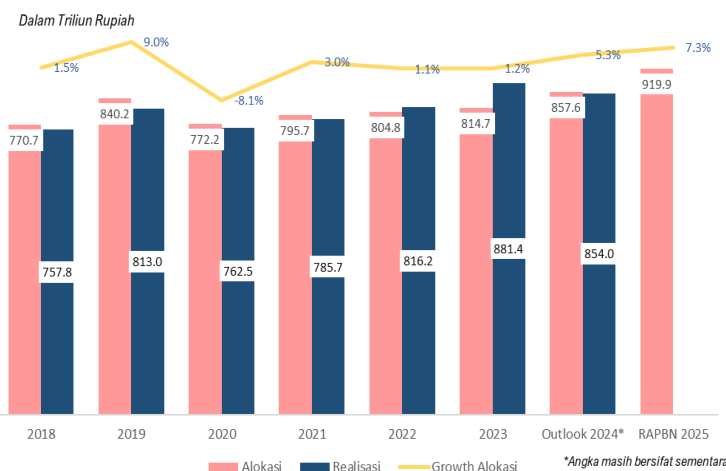


RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TA 2025



TRANSFER KE DAERAH (TKD) TA 2025

Diarahkan untuk Mendorong Belanja Daerah yang Efektif dan Efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah



KEBIJAKAN UMUM TKD 2025

- 1 Sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah.
- 2 Menciptakan kegiatan ekonomi baru (*growth, wellbeing*, dan konvergensi).
- 3 Perbaikan kualitas belanja APBD.
- 4 Penguatan *local taxing power*.
- 5 Pengembangan pembiayaan inovatif.

Peningkatan alokasi TKD antara lain dipengaruhi oleh:

- peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui DBH,
- dukungan pendanaan untuk PPPK,
- penambahan target sasaran guru penerima dana TPG yang telah bersertifikasi, dan
- dukungan penganggaran untuk prioritas nasional

POSTUR TRANSFER KE DAERAH TA 2025

URAIAN	2023	2024	2024	2025
	Realisasi (Audited)	Perpres 76/2023	Outlook	RUU APBN 2025
1. Dana Bagi Hasil	205,7	143,1	143,1	192,3
2. Dana Alokasi Umum	398,0	427,7	427,7	446,6
- DAU tidak ditentukan penggunaannya	288,9	343,5	343,5	358,6
- DAU ditentukan penggunaannya :	109,1	84,2	84,2	88,0
▪ Penggajian Formasi PPPK	25,7	15,7	15,7	17,3
▪ Pendanaan Kelurahan	1,6	1,7	1,7	1,7
▪ Pendanaan Layanan Publik	81,7	66,8	66,8	69,0
3. Dana Alokasi Khusus	181,4	188,1	184,9	185,2
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	50,3	53,8	51,1	36,9
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	128,1	133,8	132,7	146,7
c. Hibah ke Daerah	2,9	1,2	1,1	1,6
4. Dana Otonomi Khusus	17,2	18,3	18,3	17,5
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1,4	1,4	1,4	1,2
6. Dana Desa	69,9	71,0	70,9	71
7. Insentif Fiskal	7,9	8,0	7,8	6,0
TOTAL TKD	881,5	857,6	854,0	919,9

Penjelasan Pagu Anggaran TKD TA 2025:

DBH naik sebesar Rp 49,2 T karena:

- ✓ Peningkatan proyeksi penerimaan negara
- ✓ Alokasi Kurang Bayar DBH Rp27,8 T.

DAU naik sebesar Rp 18,9 T karena:

- ✓ Dukungan penggajian formasi ASND 2025 dan dukungan penggajian PPPK yang telah diangkat.
- ✓ Diusulkan untuk pergeseran DAU Penggajian PPPK ke DAU Yang tidak ditentukan Penggunaannya

DAK Nonfisik naik sebesar Rp 13,9 T karena:

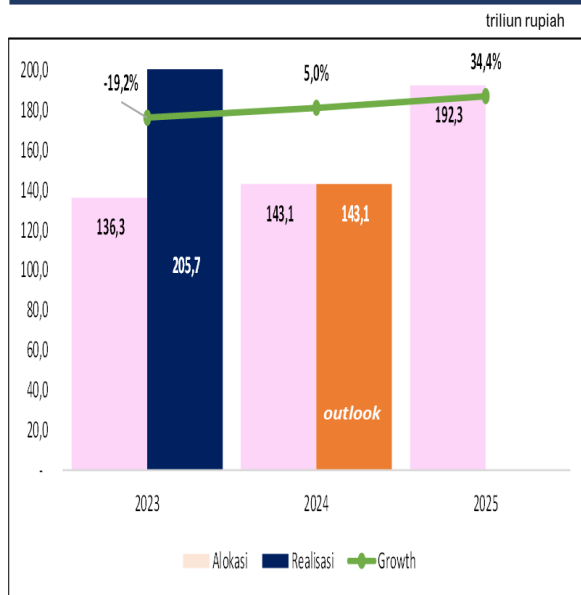
- ✓ Terutama adanya kenaikan sasaran guru bersertifikasi dan perluasan sasaran beberapa jenis DAK Nonfisik.

Beberapa jenis TKD mengalami penurunan karena:

- ✓ Untuk memberi ruang fiskal yang memadai sesuai strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL TA 2025

PERKEMBANGAN DBH TA 2023-2025



□ Pada tahun 2023, dilakukan penyelesaian KB DBH s.d. TA 2022 dan penambahan alokasi DBH reguler, sehingga total realisasi DBH menjadi Rp205,7 Triliun.

KEBIJAKAN DBH TA 2025

1. Alokasi DBH yang berkeadilan dan mendorong pelestarian lingkungan serta perubahan iklim.
2. Penyaluran DBH berdasarkan kinerja.
3. Penggunaan DBH *earmarked* untuk sektor prioritas dan penguatan sinergi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Transparansi dan akuntabilitas DBH.

POSTUR DANA BAGI HASIL TA 2025

(miliar rupiah)

Jenis DBH	2024 APBN	2025 RAPBN	Selisih	
			Rp	%
Pajak	55.773,9	77.302,8	21.528,9	38,6%
PPh	31.626,6	44.933,1	13.306,5	42,1%
PBB	19.166,6	25.970,8	6.804,2	35,5%
CHT	4.980,8	6.399,0	1.418,2	28,5%
SDA	84.326,0	85.921,0	1.595,0	1,9%
Migas	15.316,0	16.250,9	934,8	6,1%
Minerba	65.079,7	66.402,1	1.322,3	2,0%
Kehutanan	1.464,3	1.104,6	-359,6	-24,6%
Panas Bumi	1.475,8	1.426,6	-49,2	-3,3%
Perikanan	990,2	736,8	-253,3	-25,6%
Lainnya	3.000,0	1.249,9	-1.750,1	-58,3%
Perkebunan Sawit	3.000,0	1.249,9	-1.750,1	-58,3%
Kurang Bayar	0,0	27.808,0	27.808,0	
Total	143.099,9	192.281,7	49.181,8	34,4%

Alokasi DBH dalam RAPBN 2025 sebesar Rp192,3 triliun.

- Alokasi DBH Pajak sebesar Rp77,3 triliun, dengan **alokasi terbesar pada DBH PPh** sebesar Rp44,9 triliun.
- Alokasi DBH SDA sebesar Rp85,9 triliun, dengan **alokasi terbesar pada DBH Mineral dan Batubara** sebesar Rp66,4 triliun.
- Alokasi DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp1,3 triliun (4% dari perkiraan realisasi penerimaan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar tahun 2024).
- Alokasi minimum DBH Perkebunan Sawit per daerah sebesar Rp500 juta.
- Kurang Bayar DBH dialokasikan sebesar Rp27,8 triliun.

KEBIJAKAN PENGGUNAAN DBH EARMARKED TA 2025

DBH DR

- Optimalisasi penggunaan Sisa DBH DR Kab/Kota sesuai ketentuan perundangan
- Perluasan penggunaan kegiatan strategis lainnya antara lain :
 - ✓ Penguatan Integrated Area Development (IAD)
 - ✓ Pengelolaan kebersihan untuk pelestarian hutan
 - ✓ Pengelolaan jalan sekitar Kawasan
 - ✓ Dukungan pencapaian FOLU Net Sink 2030,
 - ✓ Bantuan jaminan sosial bagi pekerja sektor kehutanan kategori rentan,
 - ✓ Pengelolaan daerah aliran sungai.



DBH CHT

- Digunakan untuk bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum.
- Penerima manfaat termasuk:
 - petani tembakau dan buruh tani tembakau.
 - petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
- Fleksibilitas penggunaan
 - Opsi pengalihan anggaran.
 - Penambahan menu kegiatan.

DBH Sawit

- Fokus pada infrastruktur jalan (minimal 80% dari alokasi).
- Mendorong pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan:
 - Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan.
 - Sertifikasi ISPO pekebun.
 - Rehab hutan dan lahan.
- Terdapat nilai alokasi minimum per daerah.

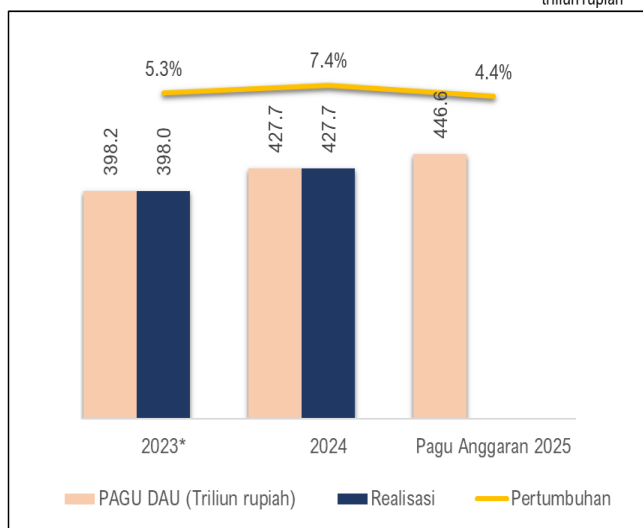


PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAU TA 2025

Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi dan ekualisasi kualitas layanan dasar daerah

PERKEMBANGAN DAU TA 2023-2025

triliun rupiah



*TA. 2023 termasuk Tambahan DAU untuk THR/G13 Guru ASND sebesar Rp2.2 T
 **(Realisasi 2024 = Outlook 2024)

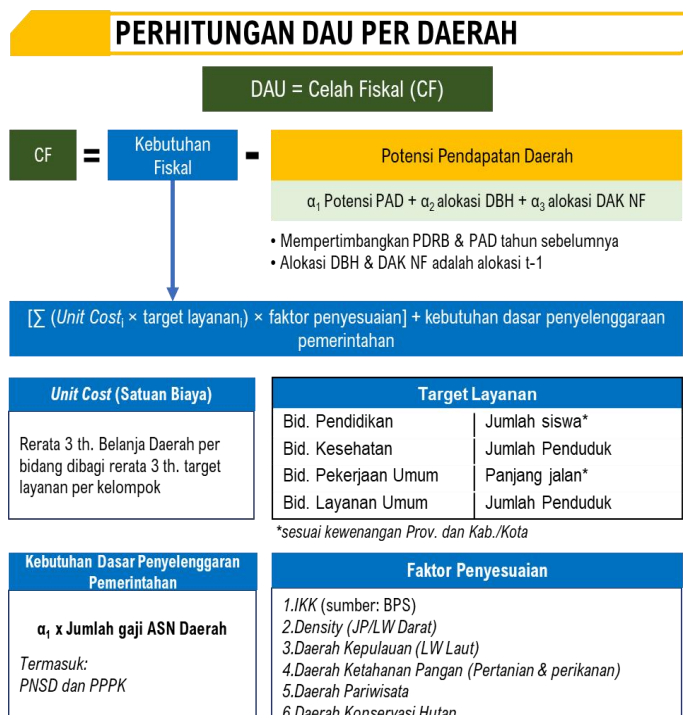
- Pagu DAU tahun 2025 tumbuh sebesar 4,4% dari tahun 2024.

KEBIJAKAN DAU TA 2025

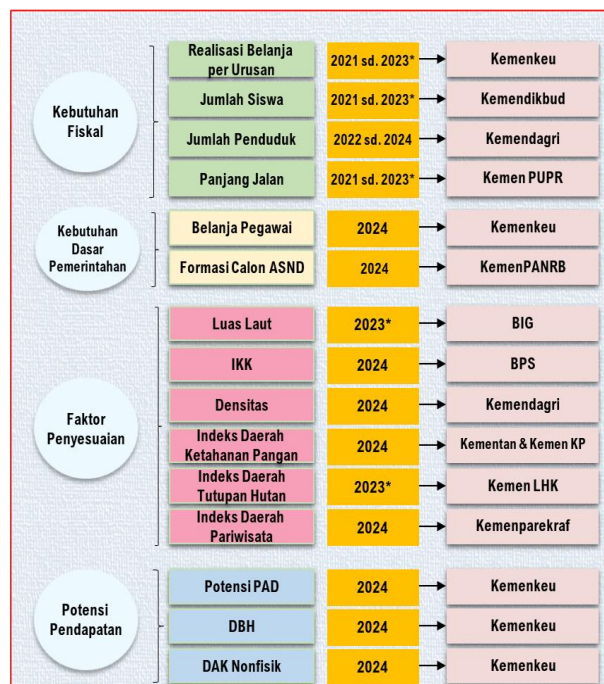
1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU diantaranya kebijakan **holdharmless** sampai 2027.
2. Memperkuat penggunaan **earmarking** DAU.
3. Menjaga tingkat **pemerataan keuangan daerah**.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola **earmarking** DAU.
5. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU berbasis **kinerja**.

DATA DASAR & FORMULA DAU TA 2025

Kebijakan formula dan data dasar perhitungan sama dengan tahun sebelumnya



DATA DASAR DAU



PAGU & PERKIRAAN PEMBAGIAN JENIS DAU TA 2025

(miliar rupiah)

NO	DAU	ALOKASI TA. 2024	ALOKASI TA. 2025		
			RUU APBN	Usulan Kesepakatan Panja TKD	SELISIH Usulan Kesepakatan Panja TKD dengan RUU APBN
1	DAU Blockgrant	343.527,6	358.617,9	360.515,9	1.898,1
2	DAU Earmarked	84.171,7	88.015,9	86.117,8	(1.898,1)
	DAU PPPK	15.676,7	17.253,2	15.355,14	(1.898,1)
	DAU Kelurahan	1.699,6	1.699,6	1.699,6	-
	DAU Pelayanan Dasar	66.795,4	69.063,1	69.063,1	-
	Total	427.699,3	446.633,8	446.633,8	0,0



Penambahan alokasi DAU diarahkan untuk dukungan kebijakan penggalangan formasi ASND yang akan diangkat tahun 2025 melalui DAU Earmarked Penggalangan PPPK 2025, dan dukungan penggalangan PPPK eksisting dalam DAU Blockgrant



Penurunan DAU Earmarked dukungan bidang Pendidikan dipengaruhi oleh peningkatan capaian SPM bidang Pendidikan secara nasional.



Kenaikan DAU Earmarked dukungan bidang Kesehatan sebagai tambahan pendanaan untuk mendukung penurunan prevalensi stunting.



Kenaikan DAU Earmarked dukungan bidang Pekerjaan Umum untuk mendukung anggaran infrastruktur sesuai UU HKPD.



Komposisi DAU Earmark tahun 2025 sebesar 19,3% dari total DAU, lebih rendah jika dibandingkan komposisi DAU Earmark tahun 2024 yang sebesar 19,7% dari total DAU

- terdapat pergeseran Jumlah DAU Penggalangan PPPK ke DAU Yang tidak ditentukan Penggunaanya

PAGU & PERKIRAAN PEMBAGIAN JENIS DAU TA 2025

URAIAN	APBN 2024	RAPBN 2025
THEIL (<i>Weighted</i>) Tanpa DAU	0,21344	0,22857
THEIL (<i>Weighted</i>) Dengan DAU	0,14817	0,14257
Penurunan	- 30,6%	- 37,6%

HASIL PENGHITUNGAN ALOKASI DAU TA. 2025:

- Formula penghitungan alokasi dan data dasar DAU TA. 2025 melanjutkan perhitungan DAU TA. 2024 sesuai formula dalam UU 1/2022;
- Dalam alokasi DAU TA. 2025 telah mempertimbangkan **Kebutuhan Daerah terkait pembayaran gaji dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat tahun 2024.**
- Hasil perhitungan alokasi DAU TA. 2025 berhasil menurunkan **indeks Theil sebesar – 37,6 %** dari tanpa DAU sebesar 0,22857 menjadi 0,14257 dengan DAU.
- Sebagian alokasi DAU per daerah akan ditentukan penggunaannya, antara lain **untuk penggajian PPPK, pendanaan Kelurahan, dan peningkatan layanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.**

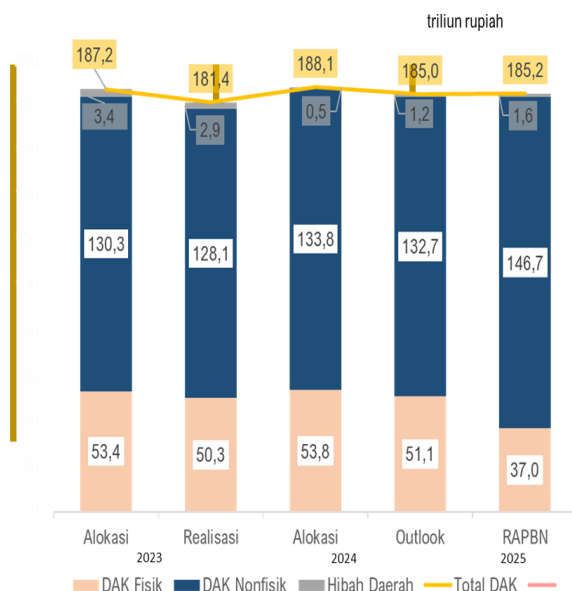
Kebijakan perhitungan alokasi

Penyesuaian alokasi DAU setiap Daerah

- Seluruh Daerah mendapatkan kenaikan alokasi minimal sebesar 2,5% dari alokasi tahun 2024 dan maksimal kenaikan 10% dari alokasi tahun 2024
- Dari penyesuaian tersebut diperoleh hasil:
 - Seluruh Daerah Provinsi mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan sebesar 4.04 %
 - Seluruh Daerah Kabupaten/Kota mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan sebesar 4.05 %

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAK TA 2025

PERKEMBANGAN DAK TA 2023-2025



- Pagu DAK tahun 2025 turun terutama karena pembangunan/rehabilitasi sekolah/kelas di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat agar seluruh siswa/guru di Indonesia dapat menikmati standar kualitas pendidikan yang sama

KEBIJAKAN DAK TA 2025

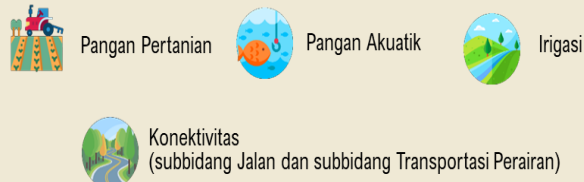
- DAK Fisik:** penyediaan **sarana-prasarana fisik layanan dasar** antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar.
- DAK Nonfisik:** **pendanaan operasional layanan publik terutama** bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pertanian, Sentra Industri dan Koperasi UMK.
- Hibah ke Daerah:** mendukung **transportasi perkotaan**, produksi pertanian di dataran tinggi/*upland*, pelestarian lingkungan hidup, serta pemulihan infrastruktur pasca bencana.
- Matching program** dan **sinergi pendanaan.**
- Meningkatkan kualitas pengelolaan DAK.**

DUKUNGAN, TEMA, & BIDANG DAK FISIK TA 2025

DAK Fisik Layanan Dasar



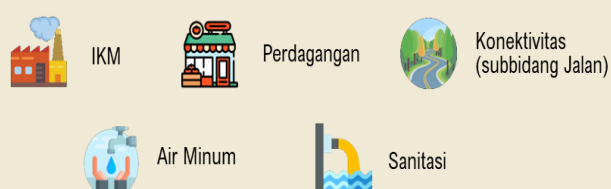
Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)



Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu

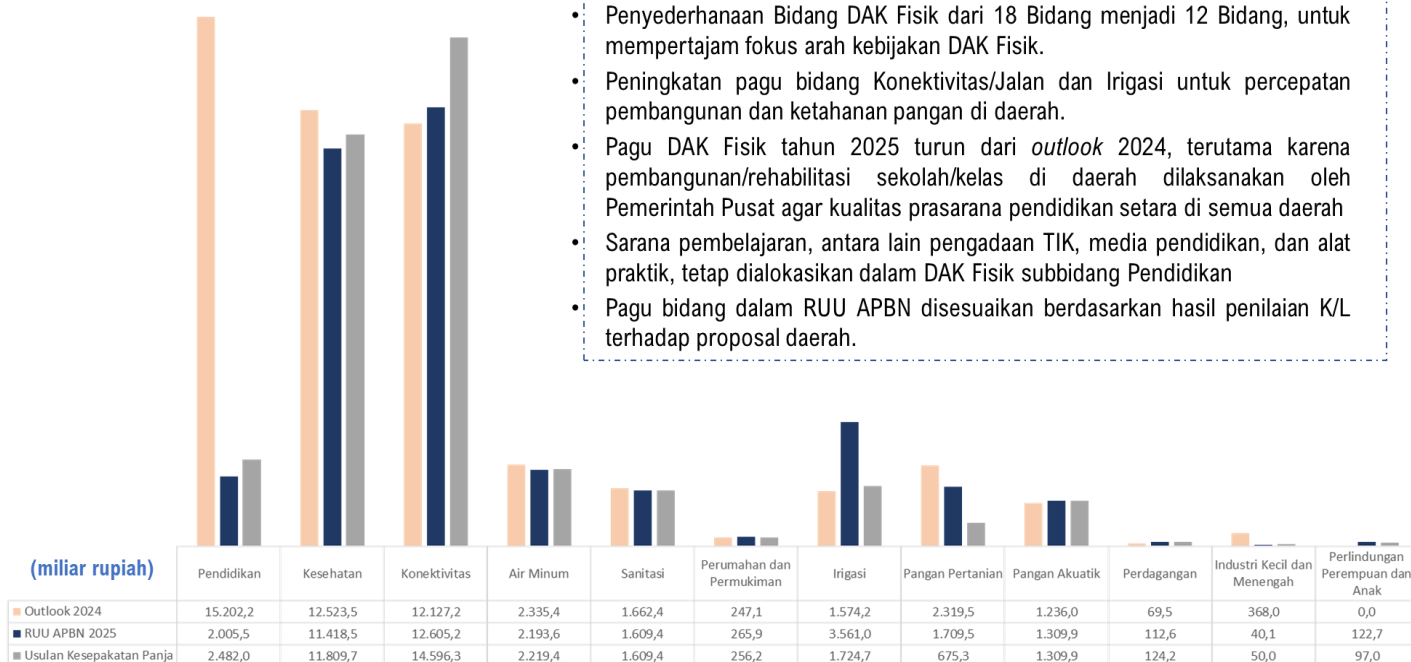


Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri



POSTUR DAK FISIK TA 2025

- Penyederhanaan Bidang DAK Fisik dari 18 Bidang menjadi 12 Bidang, untuk mempertajam fokus arah kebijakan DAK Fisik.
- Peningkatan pagu bidang Konektivitas/Jalan dan Irigasi untuk percepatan pembangunan dan ketahanan pangan di daerah.
- Pagu DAK Fisik tahun 2025 turun dari *outlook* 2024, terutama karena pembangunan/rehabilitasi sekolah/kelas di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat agar kualitas prasarana pendidikan setara di semua daerah
- Sarana pembelajaran, antara lain pengadaan TIK, media pendidikan, dan alat praktik, tetap dialokasikan dalam DAK Fisik subbidang Pendidikan
- Pagu bidang dalam RUU APBN disesuaikan berdasarkan hasil penilaian K/L terhadap proposal daerah.



POSTUR DAK FISIK TA 2025

(Miliar Rupiah)

No	Bidang	Outlook 2024	APBN 2025		Selisih
			RUU	2025	
				Usulan/Kesepakatan Panja TKD	
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Pendidikan	15.202,2	2.005,5	2.482,0	476,5
2	Kesehatan	12.523,5	11.418,5	11.809,7	391,2
3	Konektivitas (Jalan+Transportasi Perairan)	12.127,2	12.605,2	14.596,3	
	- Sub Bidang Jalan	11.777,6	12.205,2	14.258,7	2.053,4
	- Sub Bidang Transportasi Perairan	349,6	399,9	337,6	-62,3
4	Air Minum	2.335,4	2.193,6	2.219,4	25,8
5	Sanitasi	1.662,4	1.609,4	1.609,4	-
6	Irigasi	1.574,2	3.561,0	1.724,7	-1.836,3
7	Perlindungan Perempuan dan Anak	-	122,7	97,0	-25,7
8	Perumahan dan Permukiman	247,1	265,9	256,2	-9,7
9	Pangan Pertanian	2.319,5	1.709,5	675,3	-1.034,2
10	Kelautan dan Perikanan/Pangan Akuatik	1.236,0	1.309,9	1.309,9	-
11	Perdagangan	69,5	112,6	124,2	11,6
12	Industri Kecil dan Menengah	368,0	40,1	50,0	9,9
	Lainnya	1.477,3	-	-	-
TOTAL DAK FISIK		51.142,5	36.953,9	36.953,9	-

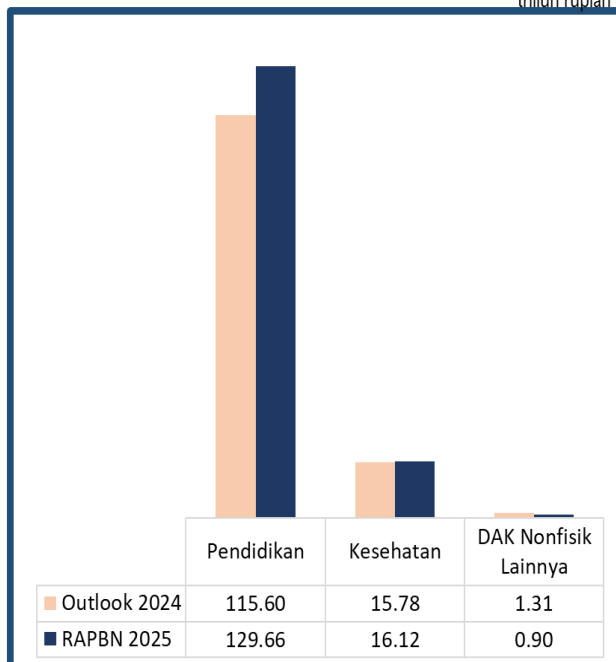
Berdasarkan penilaian atas usulan daerah dilakukan penyesuaian pagu bidang/sub bidang sebagai berikut:

- Pagu bidang irigasi, perumahan permukiman, perlindungan perempuan dan anak, serta pangan pertanian diturunkan sesuai hasil penilaian.
- Sisa pagu hasil penilaian dialihkan sesuai dengan prioritas pembangunan terutama ke bidang Pendidikan (Rp476 M), Kesehatan (Rp391 M), dan Jalan (Rp2,1 T)

POSTUR DAK NONFISIK TA 2025

PERKEMBANGAN DAK NON FISIK TA 2024-2025

triliun rupiah



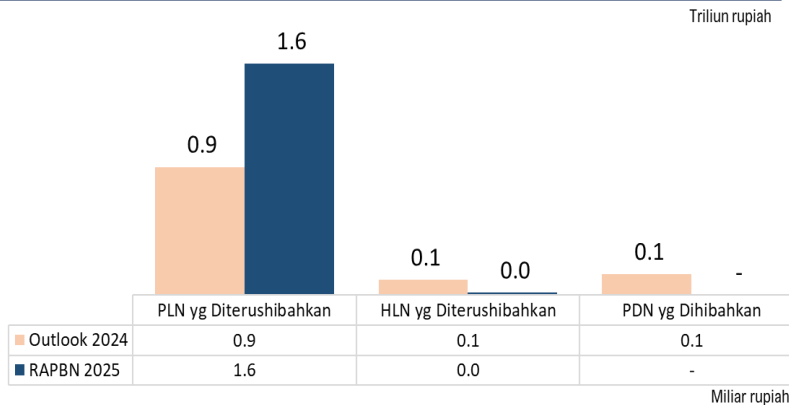
Simplifikasi Jenis dari sebelumnya 16 menjadi 14 jenis, dengan penambahan Pagu DAK Nonfisik karena:

- kenaikan jumlah guru bersertifikat, dan
- kenaikan sasaran terutama BOSP, PK2UMK, dan Pertanian.

No.	Rincian DAK NonFisik	Miliar rupiah	
		Outlook APBN 2024	RAPBN 2025
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.865,6	53.491,7
2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	4.009,1	4.038,7
3	BOP Pendidikan Kesenian	1.618,8	1.741,2
4	Tunjangan Profesi Guru ASND	52.805,5	66.921,6
5	Tambahan Penghasilan Guru ASND	1.219,4	738,2
6	Tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus	1.910,7	2.404,5
7	BOP Museum dan Taman Budaya	170,0	170,0
8	Dana BPP Perpustakaan Daerah	-	150,0
9	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12.541,8	12.878,7
10	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.239,3	3.239,3
11	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	250,0	163,7
12	Dana Pelayanan Kepariwisata	133,3	0,0
13	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	62,7	0,0
14	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	129,9	132,0
15	Dana Fasilitas Penanaman Modal	247,4	0,0
16	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	295,7	516,4
	- Subjenis Pangan		88,4
	- Subjenis Pertanian		211,7
	- Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian		216,3
17	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	194,9	92,0
TOTAL		132.694,1	146.677,9

POSTUR HIBAH DAERAH TA 2025

PERKEMBANGAN HIBAH DAERAH TA 2024-2025



Jenis Hibah kepada Daerah	Outlook 2024	RAPBN 2025 Nota Keuangan	Program/ Kegiatan
A. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	881,9	1.594,9	Pertanian, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup
B. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	102,9	14,1	
C. Penerimaan Dalam Negeri yang Diberikan	142,7	0	
Total	1.127,5	1.609,0	

- Pagu Hibah kepada Daerah TA 2025 dialokasikan untuk 3 jenis Hibah kepada Daerah (Hibah MRT, Hibah UPLAND, dan Hibah BioCF ISFL).
- Kenaikan** pagu Hibah kepada Daerah TA 2025 karena adanya peningkatan alokasi hibah untuk program MRT.

Target Output 2025, antara lain:



PERHUBUNGAN

- Lanjutan pembangunan jalur MRT Koridor Utara-Selatan Fase 2A sepanjang ± 5,8 km.
- Pembangunan jalur MRT Jakarta koridor Timur Barat Fase 1 Tahap 1 sepanjang ± 1,77 km.



PERTANIAN

- Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 102 km, terasering lahan seluas 15 ha, bantuan saprodi untuk 3.357 ha, dan pengadaan alsintan sebanyak 2.045 unit

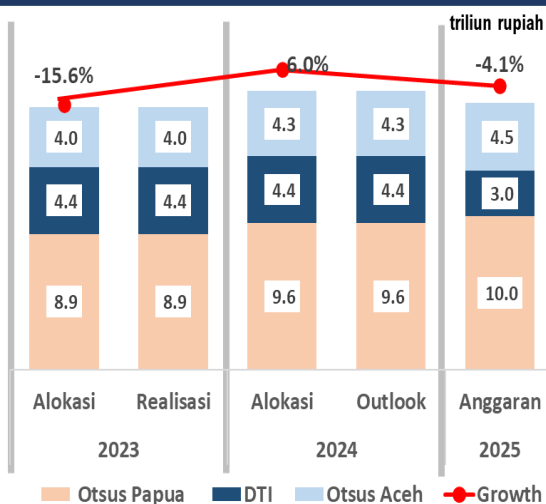


LINGKUNGAN HIDUP

- Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan sebesar 3 juta ton Co2eq; dan
- Pengelolaan area hutan dan lahan secara berkelanjutan pada 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA OTSUS & DTI TA 2025

PERKEMBANGAN OTONOMI KHUSUS TA 2023-2025



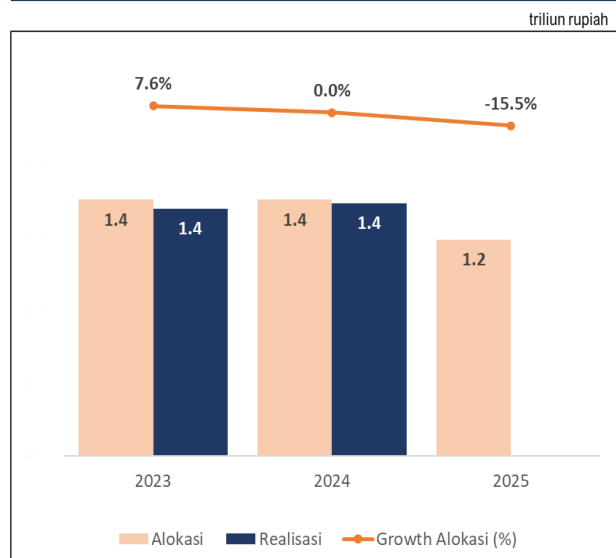
- Pagu Dana Otsus (Aceh dan Papua) TA 2025 meningkat akibat peningkatan pagu DAU.
- Pagu DTI TA 2025 lebih rendah karena strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS TA 2025

- Mendorong prioritas penggunaan Dana Otsus, untuk:
 - Penurunan kemiskinan:** perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan.
 - Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah:** penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan.
 - Mendukung capaian rencana induk** percepatan pembangunan papua untuk mewujudkan papua sehat, papua cerdas, dan papua produktif.
- Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otsus** melalui sinergi pendanaan APBN dan APBD guna mendukung pencapaian target pembangunan.
- Meningkatkan kualitas SDM** pengelola Dana Otsus terutama di DOB, melalui asistensi dan pembinaan yang intensif dan berkesinambungan.
- Penggunaan DTI pada DOB, diprioritaskan untuk pembangunan **infrastruktur penunjang** gedung perkantoran.

PERKEMBANGAN & KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2025

PERKEMBANGAN DAIS TA 2023-2025



- Pagu alokasi Dana keistimewaan 2025 lebih rendah karena strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah oleh K/L serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

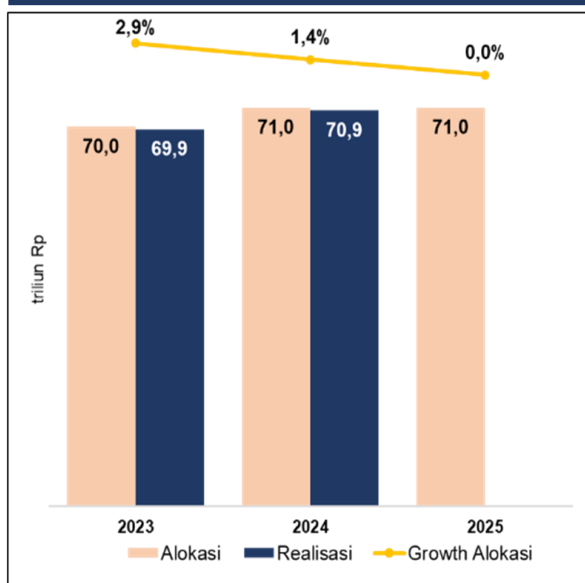
KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2025

- Mengarahkan **penggunaan** Dana Keistimewaan fokus untuk:
 - penurunan tingkat kemiskinan;
 - pemberdayaan masyarakat dan UMKM,
 - peningkatan penyediaan layanan dasar publik,
 - serta mengurangi belanja birokrasi penunjang, administrasi dan pengawasan;
- Meningkatkan **sinergi** dengan Belanja K/L untuk pencapaian **prioritas nasional** dengan mempertimbangkan prioritas daerah.
- Meningkatkan **tata kelola pemanfaatan** Dana Keistimewaan DIY yang inovatif, partisipatif, dan transparan **melalui** pengembangan **sistem informasi yang terintegrasi** secara berkelanjutan.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA DESA TA 2025

Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

PERKEMBANGAN DANA DESA TA 2023-2025



*) Outlook realisasi tahun 2024.

- Pagu Dana Desa tahun 2025 naik sebesar 0,2% dari outlook realisasi tahun 2024.

KEBIJAKAN DANA DESA TA 2025

- Mendorong peningkatan kemandirian desa & kualitas tata kelola Dana Desa melalui:
 - penyaluran Dana Desa berdasarkan fokus penggunaan yang ditetapkan,
 - penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD,
 - pemberian *reward* berupa alokasi kinerja dan insentif desa,
 - pemberian *reward* penyaluran Dana Desa lebih besar pada tahap I kepada desa berstatus Mandiri, dan
 - penerapan sanksi terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal.
- Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa melalui:
 - penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa paling tinggi 15%,
 - penguatan desa untuk aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim,
 - promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan desa termasuk stunting,
 - dukungan program ketahanan pangan,
 - pengembangan potensi dan keunggulan desa,
 - percepatan implementasi desa digital,
 - pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal,
 - operasional pemerintah desa paling tinggi 3%, dan/atau
 - program sektor prioritas lainnya di desa.
- Meningkatkan kualitas data keuangan desa berbasis elektronik terintegrasi dalam rangka memperkuat monitoring dan evaluasi.

FORMULA PENGALOKASIAN DANA DESA TA 2025

Pagu Rp71 T dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 Kab/Kota

Yang terdiri atas:

A

Sebesar **Rp69 T** pengalokasiannya dihitung sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula = AD + AA + AK + AF



Alokasi Dasar (AD) sebesar 65% dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk



Alokasi Afirmasi (AA) sebesar 1% dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak.

Dalam kurun 2022-2024, rata-rata penerima AA untuk Desa Tertinggal sebesar Rp106,6 juta/desa. Untuk Desa Sangat Tertinggal Rp167,2 juta/desa.



Alokasi Kinerja (AK) sebesar 4% (empat persen) dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. Penilaian AK dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota

Dalam kurun 2022-2024, rata-rata penerima AK sebesar Rp235,6 juta/desa.



Alokasi Formula (AF) sebesar 30% dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa



B

Sebesar **Rp2 T** dialokasikan dan disalurkan sebagai Insentif Desa pada tahun anggaran berjalan berdasarkan kinerja desa atas peningkatan tata kelola keuangan desa dan penghargaan yang diberikan oleh kementerian/lembaga



Pagu sebesar Rp2T dialokasikan kepada desa berdasarkan pemenuhan Kriteria Utama dan capaian Kriteria Kinerja. **Kriteria Kinerja meliputi:**

1. Kinerja Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:
 - o Kinerja Keuangan dan Pembangunan Desa
 - o Tata Kelola Keuangan dan Akuntabilitas Keuangan Desa
2. Penghargaan Kementerian/lembaga

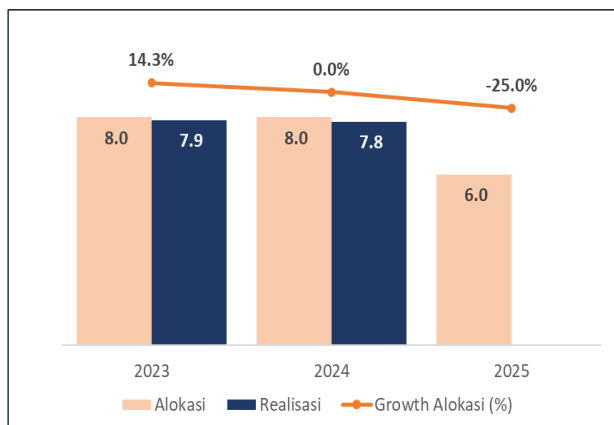


Penyaluran dilakukan terpisah dengan penyaluran pagu berdasarkan formula regular.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TA 2025

Mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata Kelola APBD

PERKEMBANGAN DANA INSENTIF FISKAL TA 2023-2025



- ❑ Outlook penyaluran insentif fiskal 2024 sebesar Rp7,8 triliun, dimana terdapat beberapa daerah yang tidak dapat disalurkan karena tidak memenuhi syarat salur
- ❑ Pagu Insentif Fiskal tahun 2025 lebih rendah karena kinerja daerah juga diperhitungkan di alokasi DAU dan DBH serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

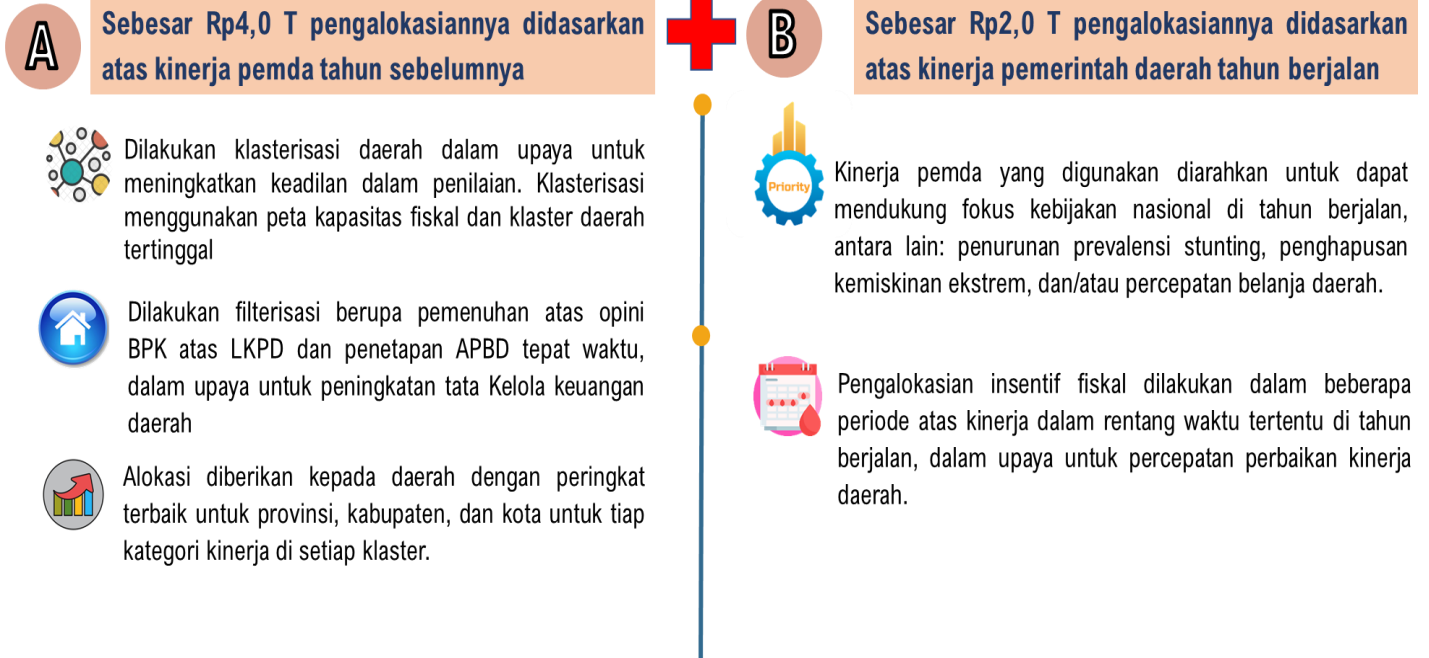
KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TA 2025

1. Pengalokasian berdasarkan **kinerja tahun anggaran sebelumnya** dan **tahun anggaran berjalan**;
2. Indikator kinerja tahun sebelumnya meliputi **pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar**;
3. Indikator kinerja tahun berjalan meliputi dukungan **pencapaian target prioritas nasional**
4. Mendorong peran Insentif Fiskal untuk meningkatkan **kemandirian daerah**, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain.
5. Melanjutkan **pemberian Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal** dengan tetap memperhatikan kinerja daerah tertinggal.

FORMULA PENGALOKASIAN INSENTIF FISKAL TA 2025

Pagu Rp6,0 T dialokasikan Atas Kinerja Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan

Yang terdiri atas:





RINCIAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH TA 2025



REKAPITULASI ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

NO	PEMERINTAH DAERAH	DANA BAGI HASIL	DANA ALOKASI UMUM	DAK FISIK	DAK NONFISIK	DANA DESA	INSENTIF FISKAL	JUMLAH
1	PROVINSI SUMATERA BARAT	173.417.906	2.114.408.729	143.773.795	978.486.326	-	15.594.394	3.425.681.150
2	KAB. LIMA PULUH KOTA	27.061.631	776.228.584	50.443.326	235.483.825	86.629.539	-	1.175.846.905
3	KAB. AGAM	18.774.035	894.663.940	22.214.470	266.203.604	100.939.408	-	1.302.795.457
4	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	14.290.281	617.399.822	77.779.256	106.774.027	45.696.238	21.715.422	883.655.046
5	KAB. PADANG PARIAMAN	12.487.302	794.120.185	56.388.579	254.417.456	102.989.508	7.116.369	1.227.519.399
6	KAB. PASAMAN	12.463.187	637.737.651	38.765.841	192.885.449	69.215.249	-	951.067.377
7	KAB. PESIRIR SELATAN	26.299.085	959.654.408	89.386.963	308.914.268	167.031.704	-	1.551.286.428
8	KAB. SIJUNJUNG	28.943.333	574.459.913	61.986.754	159.375.049	63.528.658	6.986.983	895.280.690
9	KAB. SOLOK	13.836.379	747.218.531	87.563.343	242.371.511	82.730.445	-	1.173.720.209
10	KAB. TANAH DATAR	12.699.887	721.112.879	111.008.392	186.368.306	75.573.026	16.403.358	1.123.165.848
11	KOTA BUKIT TINGGI	14.750.660	464.762.519	12.515.504	68.540.922	-	-	560.569.605
12	KOTA PADANG PANJANG	8.295.695	388.267.301	5.633.448	37.471.727	-	-	439.668.171
13	KOTA PADANG	98.955.933	1.304.985.842	51.294.476	379.590.852	-	16.374.531	1.851.201.634
14	KOTA PAYAKUMBUH	10.153.769	460.348.522	21.424.178	84.457.431	-	8.671.856	585.055.756
15	KOTA SAWAHLUNTO	26.145.830	393.976.523	32.876.407	49.593.373	21.612.927	8.752.114	532.957.174
16	KOTA SOLOK	12.232.651	413.143.609	6.295.116	51.314.429	-	20.917.821	503.903.626
17	KOTA PARIAMAN	9.898.551	425.165.056	27.054.849	67.244.897	41.027.669	6.963.163	577.354.185
18	KAB. PASAMAN BARAT	31.092.113	699.144.283	62.615.656	233.751.610	98.139.345	-	1.124.743.007
19	KAB. DHARMASRAYA	37.106.493	533.940.082	32.878.557	147.185.576	56.185.785	7.204.202	814.500.695
20	KAB. SOLOK SELATAN	49.692.333	481.316.945	51.084.643	112.468.929	43.100.516	7.296.889	744.960.255
JUMLAH		638.597.054	14.402.055.324	1.042.983.553	4.162.899.567	1.054.400.017	143.997.102	21.444.932.617

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
PROVINSI SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	3.425.681.150
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	173.417.906
1. DBH Pajak	142.135.440
a. Pajak Penghasilan	119.708.401
b. Pajak Bumi dan Bangunan	19.955.050
c. Cukai Hasil Tembakau	2.471.989
2. DBH Sumber Daya Alam	21.202.783
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	8.171.245
c. Kehutanan	7.970.339
d. Perikanan	-
e. Panas Bumi	5.061.199
3. DBH Lainnya	10.079.683
a. Perkebunan Sawit	10.079.683
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	2.114.408.729
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.813.526.490
2. DAU ditentukan penggunaannya	300.882.239
a. Penggajian Formasi PPPK	27.877.651
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	131.151.790
d. Bidang Kesehatan	72.190.878
e. Bidang Pekerjaan Umum	69.661.920
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.122.260.121
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	143.773.795
a. Pendidikan	50.148.594
b. Kesehatan	21.642.976
c. Konektivitas	36.801.081
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	14.539.912
h. Pangan Pertanian	2.192.307
i. Pangan Akuatik	17.100.000
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	1.348.925
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	978.486.326
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	425.527.028
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	540.898.162
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	3.828.535
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	6.731.941
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	200.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	150.000
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	15.594.394

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. LIMA PULUH KOTA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.175.846.905
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	27.061.631
1. DBH Pajak	8.142.355
a. Pajak Penghasilan	5.439.275
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.703.080
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	16.702.934
a. Migas	12.821.066
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	2.580.434
c. Kehutanan	239.374
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	210.884
3. DBH Lainnya	2.216.342
a. Perkebunan Sawit	2.216.342
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	776.228.584
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	629.953.136
2. DAU ditentukan penggunaannya	146.275.448
a. Penggajian Formasi PPPK	13.938.826
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	67.320.090
d. Bidang Kesehatan	29.237.080
e. Bidang Pekerjaan Umum	35.779.452
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	285.927.151
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	50.443.326
a. Pendidikan	1.836.347
b. Kesehatan	10.718.901
c. Konektivitas	30.098.577
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	5.979.751
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	1.809.750
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	235.483.825
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	64.165.980
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	143.570.379
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	21.483.164
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	5.013.642
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	850.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	86.629.539
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. AGAM

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.302.795.457
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	18.774.035
1. DBH Pajak	13.611.350
a. Pajak Penghasilan	8.382.289
b. Pajak Bumi dan Bangunan	5.229.061
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.854.983
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	583.619
c. Kehutanan	32.034
d. Perikanan	1.028.446
e. Panas Bumi	210.884
3. DBH Lainnya	3.307.702
a. Perkebunan Sawit	3.307.702
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	894.663.940
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	773.645.573
2. DAU ditentukan penggunaannya	121.018.367
a. Penggajian Formasi PPPK	6.272.472
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	50.266.849
d. Bidang Kesehatan	33.141.883
e. Bidang Pekerjaan Umum	31.337.163
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	288.418.074
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	22.214.470
a. Pendidikan	2.118.168
b. Kesehatan	6.794.251
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	7.159.623
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	6.142.428
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	266.203.604
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	72.003.750
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	165.761.630
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	1.014.775
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	20.968.648
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	6.054.141
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	100.939.408
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	883.655.046
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	14.290.281
1. DBH Pajak	7.510.796
a. Pajak Penghasilan	4.185.955
b. Pajak Bumi dan Bangunan	3.324.841
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	6.779.485
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	465.570
c. Kehutanan	1.169.667
d. Perikanan	4.933.364
e. Panas Bumi	210.884
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	617.399.822
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	378.739.222
2. DAU ditentukan penggunaannya	238.660.600
a. Penggajian Formasi PPPK	32.839.873
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	65.730.629
d. Bidang Kesehatan	31.303.775
e. Bidang Pekerjaan Umum	108.786.323
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	184.553.283
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	77.779.256
a. Pendidikan	663.220
b. Kesehatan	1.767.817
c. Konektivitas	64.972.219
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	10.376.000
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	106.774.027
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	26.984.126
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	62.752.475
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	15.415.429
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1.621.997
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	45.696.238
E. Insentif Fiskal	21.715.422

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. PADANG PARIAMAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.227.519.399
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	12.487.302
1. DBH Pajak	8.734.367
a. Pajak Penghasilan	7.460.034
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.274.333
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.762.939
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	456.583
c. Kehutanan	31.218
d. Perikanan	1.060.775
e. Panas Bumi	214.363
3. DBH Lainnya	1.989.996
a. Perkebunan Sawit	1.989.996
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	794.120.185
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	638.430.057
2. DAU ditentukan penggunaannya	155.690.128
a. Penggajian Formasi PPPK	15.100.394
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	44.182.570
d. Bidang Kesehatan	41.112.104
e. Bidang Pekerjaan Umum	55.295.060
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	310.806.035
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56.388.579
a. Pendidikan	1.081.829
b. Kesehatan	17.409.686
c. Konektivitas	16.577.489
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	4.372.743
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	7.148.004
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	9.798.828
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	254.417.456
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	63.747.800
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	151.319.435
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	33.363.485
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	5.986.736
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	102.989.508
E. Insentif Fiskal	7.116.369

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. PASAMAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	951.067.377
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	12.463.187
1. DBH Pajak	6.837.409
a. Pajak Penghasilan	5.516.972
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.320.437
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	3.089.975
a. Migas	337.317
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	584.770
c. Kehutanan	150.125
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	1.166.587
3. DBH Lainnya	2.535.803
a. Perkebunan Sawit	2.535.803
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	637.737.651
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	509.272.437
2. DAU ditentukan penggunaannya	128.465.214
a. Penggajian Formasi PPPK	15.820.567
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	43.187.685
d. Bidang Kesehatan	34.576.025
e. Bidang Pekerjaan Umum	34.880.937
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	231.651.290
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	38.765.841
a. Pendidikan	793.444
b. Kesehatan	11.243.000
c. Konektivitas	25.230.437
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	1.498.960
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	192.885.449
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	51.223.500
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	111.996.897
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	682.040
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	24.162.033
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.315.289
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	69.215.249
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. PESISIR SELATAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.551.286.428
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	26.299.085
1. DBH Pajak	18.084.301
a. Pajak Penghasilan	7.428.659
b. Pajak Bumi dan Bangunan	10.655.642
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	4.351.145
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	866.431
c. Kehutanan	73.350
d. Perikanan	2.261.435
e. Panas Bumi	1.149.929
3. DBH Lainnya	3.863.639
a. Perkebunan Sawit	3.863.639
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	959.654.408
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	767.897.432
2. DAU ditentukan penggunaannya	191.756.976
a. Penggajian Formasi PPPK	10.337.962
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	84.292.205
d. Bidang Kesehatan	32.865.684
e. Bidang Pekerjaan Umum	64.261.125
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	398.301.231
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	89.386.963
a. Pendidikan	691.997
b. Kesehatan	37.103.839
c. Konektivitas	37.256.127
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	7.084.685
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	7.250.315
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	308.914.268
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	81.816.921
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	186.414.966
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	27.896.321
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	8.528.900
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.106.500
D. Dana Desa	167.031.704
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. SIJUNJUNG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	895.280.690
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	28.943.333
1. DBH Pajak	8.678.700
a. Pajak Penghasilan	4.942.743
b. Pajak Bumi dan Bangunan	3.735.957
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	17.969.478
a. Migas	12.483.749
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	3.935.040
c. Kehutanan	480.685
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	218.828
3. DBH Lainnya	2.295.155
a. Perkebunan Sawit	2.295.155
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	574.459.913
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	439.657.761
2. DAU ditentukan penggunaannya	134.802.152
a. Penggajian Formasi PPPK	26.344.380
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	39.468.282
d. Bidang Kesehatan	29.542.927
e. Bidang Pekerjaan Umum	39.446.563
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	221.361.803
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.986.754
a. Pendidikan	877.944
b. Kesehatan	21.967.339
c. Konektivitas	31.786.560
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	2.279.719
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	5.075.192
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	159.375.049
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	43.824.440
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	94.356.459
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	16.728.898
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.959.562
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	63.528.658
E. Insentif Fiskal	6.986.983

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. SOLOK

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.173.720.209
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	13.836.379
1. DBH Pajak	6.847.883
a. Pajak Penghasilan	5.321.588
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.526.295
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	4.407.249
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	2.163.359
c. Kehutanan	64.045
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	1.328.669
3. DBH Lainnya	2.581.247
a. Perkebunan Sawit	2.581.247
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	747.218.531
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	608.100.357
2. DAU ditentukan penggunaannya	139.118.174
a. Penggajian Formasi PPPK	16.401.351
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	48.371.871
d. Bidang Kesehatan	40.561.406
e. Bidang Pekerjaan Umum	33.783.546
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	329.934.854
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	87.563.343
a. Pendidikan	2.326.204
b. Kesehatan	28.808.348
c. Konektivitas	20.678.976
d. Air Minum	817.600
e. Sanitasi	9.810.167
f. Perumahan dan Permukiman	2.150.401
g. Irigasi	4.756.667
h. Pangan Pertanian	18.214.980
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	242.371.511
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	69.063.276
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	138.041.195
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	25.612.575
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.789.345
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.464.460
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	82.730.445
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. TANAH DATAR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.123.165.848
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	12.699.887
1. DBH Pajak	8.048.444
a. Pajak Penghasilan	6.792.754
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.255.690
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	3.347.178
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	2.236.051
c. Kehutanan	41.123
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	218.828
3. DBH Lainnya	1.304.265
a. Perkebunan Sawit	1.304.265
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	721.112.879
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	610.919.786
2. DAU ditentukan penggunaannya	110.193.093
a. Penggajian Formasi PPPK	278.777
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	38.288.819
d. Bidang Kesehatan	26.034.245
e. Bidang Pekerjaan Umum	45.591.252
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	297.376.698
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	111.008.392
a. Pendidikan	435.928
b. Kesehatan	73.127.053
c. Konektivitas	20.199.250
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	6.191.640
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	11.054.521
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	186.368.306
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	48.719.600
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	112.849.528
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	19.911.932
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.486.586
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	75.573.026
E. Insentif Fiskal	16.403.358

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA BUKIT TINGGI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	560.569.605
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	14.750.660
1. DBH Pajak	12.384.632
a. Pajak Penghasilan	11.319.469
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.065.163
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.526.840
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	456.069
c. Kehutanan	30.385
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	206.581
3. DBH Lainnya	839.188
a. Perkebunan Sawit	839.188
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	464.762.519
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	410.191.454
2. DAU ditentukan penggunaannya	54.571.065
a. Penggajian Formasi PPPK	2.787.765
b. Pendanaan Kelurahan	4.800.000
c. Bidang Pendidikan	17.440.108
d. Bidang Kesehatan	25.912.633
e. Bidang Pekerjaan Umum	3.630.559
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	81.056.426
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	12.515.504
a. Pendidikan	12.250.050
b. Kesehatan	265.454
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	68.540.922
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	25.732.270
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	32.092.270
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	1.369.274
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	7.393.830
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1.447.588
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA PADANG PANJANG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	439.668.171
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	8.295.695
1. DBH Pajak	6.065.213
a. Pajak Penghasilan	5.041.882
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.023.331
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.526.799
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	456.069
c. Kehutanan	30.344
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	206.581
3. DBH Lainnya	703.683
a. Perkebunan Sawit	703.683
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	388.267.301
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	337.314.137
2. DAU ditentukan penggunaannya	50.953.164
a. Penggajian Formasi PPPK	1.319.542
b. Pendanaan Kelurahan	3.200.000
c. Bidang Pendidikan	28.805.149
d. Bidang Kesehatan	14.434.743
e. Bidang Pekerjaan Umum	3.193.730
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	43.105.175
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.633.448
a. Pendidikan	572.099
b. Kesehatan	5.061.349
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	37.471.727
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	11.284.950
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	18.996.541
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	4.574.996
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1.214.580
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.000.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA PADANG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.851.201.634
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	98.955.933
1. DBH Pajak	95.407.927
a. Pajak Penghasilan	87.638.887
b. Pajak Bumi dan Bangunan	7.769.040
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	2.214.724
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	526.059
c. Kehutanan	36.384
d. Perikanan	1.433.453
e. Panas Bumi	218.828
3. DBH Lainnya	1.333.282
a. Perkebunan Sawit	1.333.282
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.304.985.842
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.051.651.224
2. DAU ditentukan penggunaannya	253.334.618
a. Penggajian Formasi PPPK	113.810.511
b. Pendanaan Kelurahan	20.800.000
c. Bidang Pendidikan	86.746.026
d. Bidang Kesehatan	26.707.046
e. Bidang Pekerjaan Umum	5.271.035
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	430.885.328
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	51.294.476
a. Pendidikan	10.628.000
b. Kesehatan	17.779.692
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	14.992.261
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	7.894.523
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	379.590.852
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	138.416.500
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	206.672.031
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	27.243.652
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	7.258.669
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	16.374.531

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA PAYAKUMBUH

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	585.055.756
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	10.153.769
1. DBH Pajak	7.727.208
a. Pajak Penghasilan	6.670.817
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.056.391
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.638.729
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	568.000
c. Kehutanan	30.343
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	206.581
3. DBH Lainnya	787.832
a. Perkebunan Sawit	787.832
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	460.348.522
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	382.943.041
2. DAU ditentukan penggunaannya	77.405.481
a. Penggajian Formasi PPPK	3.363.903
b. Pendanaan Kelurahan	9.400.000
c. Bidang Pendidikan	35.246.919
d. Bidang Kesehatan	24.544.785
e. Bidang Pekerjaan Umum	4.849.874
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	105.881.609
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	21.424.178
a. Pendidikan	1.195.862
b. Kesehatan	12.887.442
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	4.972.370
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	2.368.504
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	84.457.431
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	29.716.500
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	41.403.391
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	10.506.723
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.325.127
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	8.671.856

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA SAWAHLUNTO

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	532.957.174
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	26.145.830
1. DBH Pajak	10.167.350
a. Pajak Penghasilan	5.372.261
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.795.089
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	14.352.255
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	13.263.175
c. Kehutanan	40.912
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	214.363
3. DBH Lainnya	1.626.225
a. Perkebunan Sawit	1.626.225
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	393.976.523
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	354.678.128
2. DAU ditentukan penggunaannya	39.298.395
a. Penggajian Formasi PPPK	2.323.138
b. Pendanaan Kelurahan	2.000.000
c. Bidang Pendidikan	10.550.719
d. Bidang Kesehatan	12.483.657
e. Bidang Pekerjaan Umum	11.940.881
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	82.469.780
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	32.876.407
a. Pendidikan	457.906
b. Kesehatan	2.475.000
c. Konektivitas	26.521.048
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	3.422.453
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	49.593.373
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	10.479.610
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	26.727.101
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	2.175.000
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	7.367.962
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1.488.010
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	850.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	21.612.927
E. Insentif Fiskal	8.752.114

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA SOLOK

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	503.903.626
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	12.232.651
1. DBH Pajak	8.435.475
a. Pajak Penghasilan	7.368.733
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.066.742
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.535.411
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	456.069
c. Kehutanan	31.174
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	214.363
3. DBH Lainnya	2.261.765
a. Perkebunan Sawit	2.261.765
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	413.143.609
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	357.664.921
2. DAU ditentukan penggunaannya	55.478.688
a. Penggajian Formasi PPPK	3.605.510
b. Pendanaan Kelurahan	2.600.000
c. Bidang Pendidikan	28.878.603
d. Bidang Kesehatan	14.703.023
e. Bidang Pekerjaan Umum	5.691.552
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	57.609.545
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6.295.116
a. Pendidikan	207.928
b. Kesehatan	290.181
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	5.797.007
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	51.314.429
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	14.314.800
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	26.700.777
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	7.897.272
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1.395.890
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	20.917.821

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA PARIAMAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	577.354.185
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	9.898.551
1. DBH Pajak	6.642.339
a. Pajak Penghasilan	5.576.820
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.065.519
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.631.578
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	456.069
c. Kehutanan	30.343
d. Perikanan	938.585
e. Panas Bumi	206.581
3. DBH Lainnya	1.624.634
a. Perkebunan Sawit	1.624.634
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	425.165.056
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	330.312.834
2. DAU ditentukan penggunaannya	94.852.222
a. Penggajian Formasi PPPK	27.710.386
b. Pendanaan Kelurahan	3.200.000
c. Bidang Pendidikan	28.279.706
d. Bidang Kesehatan	22.797.283
e. Bidang Pekerjaan Umum	12.864.847
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	94.299.746
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	27.054.849
a. Pendidikan	1.308.042
b. Kesehatan	909.909
c. Konektivitas	24.836.898
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	67.244.897
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	17.644.200
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	34.849.622
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	11.398.097
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.347.288
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	41.027.669
E. Insentif Fiskal	6.963.163

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. PASAMAN BARAT

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.124.743.007
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	31.092.113
1. DBH Pajak	21.919.147
a. Pajak Penghasilan	6.377.297
b. Pajak Bumi dan Bangunan	15.541.850
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	2.996.070
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	498.184
c. Kehutanan	77.332
d. Perikanan	1.277.775
e. Panas Bumi	1.142.779
3. DBH Lainnya	6.176.896
a. Perkebunan Sawit	6.176.896
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	699.144.283
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	524.110.235
2. DAU ditentukan penggunaannya	175.034.048
a. Penggajian Formasi PPPK	27.877.651
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	72.751.425
d. Bidang Kesehatan	51.932.296
e. Bidang Pekerjaan Umum	22.472.676
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	296.367.266
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	62.615.656
a. Pendidikan	235.478
b. Kesehatan	5.229.453
c. Konektivitas	43.281.353
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	2.813.505
h. Pangan Pertanian	11.055.867
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	233.751.610
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	72.648.250
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	132.439.564
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	19.800.482
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.827.139
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.885.515
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	98.139.345
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. DHARMASRAYA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	814.500.695
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	37.106.493
1. DBH Pajak	17.659.782
a. Pajak Penghasilan	5.895.737
b. Pajak Bumi dan Bangunan	11.764.045
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	15.366.304
a. Migas	1.548.434
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	11.530.199
c. Kehutanan	327.405
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	1.126.461
3. DBH Lainnya	4.080.407
a. Perkebunan Sawit	4.080.407
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	533.940.082
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	426.787.552
2. DAU ditentukan penggunaannya	107.152.530
a. Penggajian Formasi PPPK	11.476.300
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	34.559.893
d. Bidang Kesehatan	26.554.670
e. Bidang Pekerjaan Umum	34.561.667
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	180.064.133
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	32.878.557
a. Pendidikan	1.826.729
b. Kesehatan	6.231.320
c. Konektivitas	22.820.551
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	1.999.957
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	147.185.576
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	39.874.153
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	83.569.887
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	19.159.634
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.076.212
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	56.185.785
E. Insentif Fiskal	7.204.202

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. SOLOK SELATAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	744.960.255
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	49.692.333
1. DBH Pajak	32.200.809
a. Pajak Penghasilan	6.035.917
b. Pajak Bumi dan Bangunan	26.164.892
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	13.927.787
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	491.737
c. Kehutanan	110.620
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	12.474.254
3. DBH Lainnya	3.563.737
a. Perkebunan Sawit	3.563.737
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	481.316.945
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	348.474.993
2. DAU ditentukan penggunaannya	132.841.952
a. Penggajian Formasi PPPK	5.366.448
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	38.085.151
d. Bidang Kesehatan	30.576.167
e. Bidang Pekerjaan Umum	58.814.186
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	163.553.572
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	51.084.643
a. Pendidikan	364.063
b. Kesehatan	21.925.400
c. Konektivitas	22.176.506
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	5.231.636
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	1.387.038
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	112.468.929
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	29.362.581
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	70.254.055
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	10.164.195
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.688.098
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	43.100.516
E. Insentif Fiskal	7.296.889

TIM PENYUSUN

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TA 2025

PEMBINA	:	Luky Alfirman	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
PENGARAH	:	1. Ludiro 2. Sandy Firdaus 3. Purwanto 4. Jaka Sucipta 5. Lydia Kurniawati Christyana 6. Adriyanto 7. Agung Widiadi	Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Dana Transfer Umum Direktur Dana Transfer Khusus Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
KETUA	:	Iwan Richard Butarbutar	Ketua Tim Reguler Penyaluran Dana Transfer
ANGGOTA	:	Kindy Rinaldy Syahrir, Mauliate Harnalyes Silitonga, Yuni Ariani, Bondan Widyatmoko, Aan Prianto, Ricka Yunita Prasetya, Tatang, Endah Pusparini, Rini Anjar Sari, Rahmatullah Priyo Kusuma, Ryan Andhika Wahyu Putra, Honiar Arfianto	
KONTRIBUTOR DATA	:	1. Tim Reguler Dana Alokasi Umum 2. Tim Reguler Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 3. Tim Reguler Dana Bagi Hasil Non Sumber Daya Alam 4. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Umum 5. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pengembangan Manusia dan Kebudayaan 6. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman 7. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik 8. Tim Reguler Hibah Daerah 9. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Khusus 10. Tim Reguler Pengelolaan Dana Desa 11. Tim Reguler Dana Otonomi Khusus 12. Tim Reguler Insentif Fiskal dan Keistimewaan 13. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan

Gedung Radius Prawiro, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1
Jakarta-10710



2025

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025



**Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta – 10710

www.djpk.kemenkeu.go.id

